

## ANALISIS PERAN BAPPELITBANG PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PERENCANAAN KEBIJAKAN KESEHATAN DAERAH DI KOTA MEDAN

Rapotan Hasibuan<sup>1</sup>, Anita Zahra Putri Purba<sup>2</sup>, Annisa Rizki Ramadani Siregar<sup>3\*</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat<sup>1,2,3</sup>

\*Corresponding Author : annisarizkiramada@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Provinsi Sumatera Utara dalam perencanaan kebijakan kesehatan daerah di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, serta menggunakan metode wawancara semi-terstruktur dengan tiga orang informan sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika perencanaan kebijakan kesehatan di tingkat daerah, dengan fokus pada analisis proses perumusan kebijakan, koordinasi antar lembaga, implementasi program, serta evaluasi kebijakan yang telah dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappelitbang memegang peran yang sangat krusial dalam mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sisi pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Bappelitbang juga memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan data dan bukti ilmiah guna menyelaraskan kebijakan kesehatan daerah dengan prioritas pembangunan nasional yang terus berkembang. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam perencanaan kebijakan kesehatan, seperti kendala dalam koordinasi antar instansi, keterbatasan akses terhadap data yang akurat, serta adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan yang seharusnya berjalan secara paralel. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan kesehatan daerah agar dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan mengatasi tantangan tersebut, diharapkan kebijakan kesehatan daerah dapat lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesehatan publik di Kota Medan.

**Kata kunci:** Bappelitbang, Kebijakan Kesehatan, Perencanaan.

### ABSTRACT

*This study analyzes the role of the Regional Planning, Research, and Development Agency (Bappelitbang) of North Sumatra Province in the planning of regional health policies in Medan City. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study design, as well as semi-structured interviews with three informants to gather additional information. The study aims to understand the dynamics of health policy planning at the regional level, focusing on the analysis of the policy formulation process, inter-agency coordination, program implementation, and policy evaluation. The results of the study show that Bappelitbang plays a crucial role in coordinating various stakeholders, integrating data and scientific evidence, and aligning regional health policies with national development priorities. However, the study also identifies challenges such as coordination issues between agencies, limited access to accurate data, and gaps between policy planning and implementation. Therefore, this research highlights the importance of improving inter-agency coordination, utilizing information technology for data management, and involving the community in the health policy planning process to produce more effective and targeted policies. By addressing these challenges, it is hoped that regional health policies can be more responsive and adaptive to the needs of the community, thereby having a more significant impact on improving public health in Medan City.*

**Kata kunci:** Bappelitbang, Health Policy, Planning.

## PENDAHULUAN

Dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan peningkatan dalam pembangunan, kesehatan menjadi salah satu indikator utama. Tanggungjawab terbesar dalam hal ini, ada peran besar dari pemerintah terutama pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan. Tentu nya hal tersebut disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat yang memiliki karakteristik nya masing-masing. (Trisnantoro, 2018). Di Provinsi Sumatera Utara, Bappelitbang memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, termasuk di sektor kesehatan.

Kebijakan kesehatan daerah sangat terkait dengan arah kebijakan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN menitikberatkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta percepatan penurunan angka stunting dan malnutrisi. Target ini perlu dijabarkan dengan jelas melalui kebijakan di tingkat daerah dalam RPJMD, yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai arahan untuk pembangunan lima tahun yang akan datang.

Kota Medan, yang merupakan kota terbesar di Sumatera Utara, dihadapkan pada berbagai tantangan kesehatan yang rumit. Informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Medan pada tahun 2023 mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan dalam akses terhadap layanan kesehatan, tingginya angka kasus penyakit menular dan tidak menular, serta kondisi lingkungan yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan laporan tersebut, angka kematian ibu di Kota Medan pada tahun 2022 masih mencapai 115 per 100.000 kelahiran hidup, sementara target nasional ditetapkan sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup. Di samping itu, terdapat peningkatan prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes melitus, dengan angka mencapai 34,1% dan 2,6% dari jumlah keseluruhan populasi.

Tantangan lain yang dihadapi Kota Medan adalah ketimpangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Medan (2023) menunjukkan bahwa rasio dokter terhadap penduduk masih 1:2.500, jauh dari standar WHO yaitu 1:1.000. Selain itu, beberapa kecamatan di pinggiran kota masih kekurangan Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Dalam menghadapi tantangan ini, proses untuk merancang kebijakan kesehatan yang tepat dan berbasis bukti menjadi sangat penting. Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, proses ini disesuaikan dengan PERGUB SUMUT Nomor 39 Tahun 2020, memiliki peranan pokok dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya sektor kesehatan. Peran Bappelitbang menjadi krusial dalam mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan, mengintegrasikan data dan bukti ilmiah, serta menyelaraskan kebijakan kesehatan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.

Pemerintah memulai proses pembangunan daerah dengan membuat rencana pembangunan bersama pemerintah daerah dan para pihak yang berkepentingan sesuai dengan peran dan wewenangnya menghasilkan dokumen rencana pembangunan daerah. Dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan pedoman selama 20 tahun ke depan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pedoman selama 5 tahun ke depan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Pembangunan Tahunan (Hasibuan S, Marliyah. 2022).

Di Kota Medan, Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara memiliki peran penting dalam merancang perencanaan kebijakan kesehatan yang tidak hanya mendukung prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN, tetapi juga mampu mengakomodasi kondisi lokal dan tantangan spesifik yang dihadapi daerah. Kota Medan, sebagai ibu kota provinsi, memiliki kompleksitas masalah kesehatan, termasuk tingginya prevalensi penyakit tidak menular,

rendahnya cakupan layanan kesehatan primer, serta perlunya penguatan sistem kesehatan secara menyeluruh.

Sebagai institusi perencana, Bappelitbangda berperan dalam mengkoordinasikan berbagai sektor untuk menyusun kebijakan yang komprehensif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Bappelitbangda diharapkan mampu mengintegrasikan program-program kesehatan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJMD Kota Medan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta memastikan alokasi sumber daya yang memadai. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar sektor, serta kompleksitas birokrasi yang memperlambat pengambilan keputusan.

Perencanaan kebijakan kesehatan masyarakat di daerah merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia, peran tersebut dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah seperti Badan Penelitian dan Pengembangan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda). Peran Bappelitbang sangat penting dalam merancang dan menerapkan kebijakan kesehatan yang efektif dan tepat sasaran. Sumatera Utara, menghadapi tantangan yang bervariasi dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan kesehatan yang efektif, khususnya di ibu kota provinsi, yaitu Kota Medan.

Perencanaan kebijakan kesehatan bukan hanya elemen penyembuhan atau kuratif, melainkan juga usaha pencegahan dan promosi kesehatan yang terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, kolaborasi antara Bappelitbang Prov SU dengan Dinas Kesehatan, organisasi profesi kesehatan, serta pihak lain yang relevan sangat diperlukan dalam merumuskan rencana pembangunan kesehatan yang sejalan dengan target nasional, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.

Efektivitas peran Bappelitbang dalam perencanaan kebijakan kesehatan di Kota Medan masih perlu diteliti lebih lanjut. Beberapa studi terdahulu, menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi dan keterlibatan pemangku kepentingan masih menjadi tantangan dalam perencanaan kebijakan kesehatan di tingkat daerah. Penelitian tersebut mengidentifikasi beberapa hambatan seperti ego sektoral, keterbatasan data yang akurat dan terkini, serta kurangnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat provinsi dan kota.

Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Nasution et al. (2021) mengenai implementasi kebijakan kesehatan di Sumatera Utara mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan dinamika politik lokal sering kali mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan yang telah direncanakan. Di sisi lain, inovasi dalam perencanaan kebijakan berbasis data (*data-driven policy planning*) telah terbukti meningkatkan efektivitas program kesehatan di beberapa daerah di Indonesia (Purba & Nasution, 2024).

Di sisi lain, terdapat potensi besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan *big data*. Laporan dari Kementerian Kesehatan RI (2023) menekankan pentingnya penggunaan data terpadu dalam perencanaan kesehatan daerah. Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, dengan fungsinya sebagai koordinator perencanaan, memiliki peluang untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi ini dalam proses perencanaan kebijakan kesehatan di Kota Medan.

Aspek penting lainnya adalah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan kesehatan. Studi oleh Lubis et al. (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas kebijakan kesehatan. Namun, mekanisme untuk memfasilitasi partisipasi publik dalam proses perencanaan di Bappelitbang masih perlu diperkuat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan peranan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dalam perumusan kebijakan kesehatan daerah, dan juga diharapkan dapat

memberikan kontribusi untuk memahami kompleksitas kebijakan kesehatan di tingkat daerah, khususnya peran Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dalam konteks Kota Medan. Analisisnya berfokus pada proses pengembangan kebijakan, kerjasama antar lembaga, implementasi program dan evaluasi kebijakan yang ada dan pelaksanaanya.

## METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada desain studi kasus. Pendekatan deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menganalisis peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Sumatera Utara dalam perencanaan kebijakan kesehatan Kota Medan. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran rinci tentang kerja Bappelitbang dalam mengembangkan kebijakan kesehatan, tantangan yang dihadapinya, dan bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung dalam rangka koordinasi antara pemerintah dengan instansi pemerintah terkait.

Studi kasus ini mengkaji Bappelitbangda Provinsi Sumatera Utara dalam hal perencanaan kebijakan kesehatan Kota Medan. Studi kasus bertujuan untuk mempelajari masalah dengan batasan yang jelas dan menggunakan pengambilan data menyeluruh serta berbagai sumber. Penelitian kualitatif, yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, bertujuan untuk menyelidiki kondisi objek alamiah. Sebagai bentuk pencarian dan dokumentasi langsung di lapangan, metode wawancara mendalam langsung dengan informan digunakan untuk menghasilkan penelitian ini. (Pratiwi dkk, 2021).

Lokasi penelitian di lakukan langsung di kantor Bappelitbangda Provinsi Sumatera Utara pada bulan September 2024. Peneliti melakukan wawancara mendalam pada beberapa informan dengan data dari Dinas Kesehatan untuk dikaitkan dengan jawaban informan. Informasi dan data yang ditemukan dianalisis dengan mengaitkannya dengan penelitian terdahulu.

## HASIL

### Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia dalam Evaluasi Pencapaian Target Dokumen Renstra

Rencana Strategis (Renstra) adalah salah satu dokumen penting yang dijadikan pedoman dalam merumuskan kebijakan. Dokumen ini mengandung berbagai isu kesehatan, visi dan misi yang hendak diwujudkan oleh sebuah instansi, serta pencapaian yang telah diraih dalam lima tahun terakhir. Selain itu, Renstra juga memuat sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Sebagai contoh, dalam dokumen RENSTRA DINKES Kota Medan Tahun 2021-2026, terdapat analisis masalah kesehatan yang telah disusun sebagai dasar untuk menentukan prioritas pelayanan yang akan dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan pada periode mendatang, yakni tahun 2021 hingga 2026.

**Tabel 1. Pemetaan Masalah Untuk Mengidentifikasi Prioritas dan Sasaran Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Medan**

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Kesehatan ibu dan anak	Peningkatan kematian ibu dan anak  Cakupan layanan kesehatan ibu dan anak belum memenuhi standar pelayanan minimal kesehatan.	Pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan minimal belum optimal. Untuk mencapainya, sasaran harus dijempit.  Pelayanan kesehatan ibu dan anak harus ditingkatkan dengan skrining untuk ibu dan anak yang memiliki risiko komplikasi tinggi.

	Pelayanan kesehatan dengan pendekatan continuum of care belum optimal Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga masih belum optimal. Masih ada kasus gizi buruk, stunting, kurus dan gizi lebih	Kurang konsitennya petugas kesehatan karena rangkap program pekerjaan dalam pelaksanaanya dan lain-lainnya Kurang konsitennya petugas kesehatan karena rangkap program pekerjaan dalam pelaksanaanya dan lain-lainnya
2	Rendahnya status gizi	Disebabkan kurangnya sarana di lingkungan perkantoran, tempat umum, dan sarana edukasi atau penyuluhan masyarakat, sehingga upaya suplementasi gizi masih kurang, surveilans dan sistem kewaspadaan gizi belum optimal, koordinasi lintas sektor dan program penanggulangan masalah gizi belum optimal, dan kurangnya cakupan asi eksklusif bagi anak usia 0-6 bulan.
3	Tingkat kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular	Kota Medan adalah daerah endemis penyakit DBD, masih terdapat DO TB, peningkatan kasus HIV, dan kurangnya cakupan imunisasi bayi. Selain itu, gaya hidup masyarakat perkotaan menyebabkan permasalahan ganda yaitu peningkatan penyakit tidak menular. Diperburuk dengan kualitas kesehatan lingkungan yang tidak baik.
4	Akses dan mutu pelayanan kesehatan masih belum sesuai standar	Kota Medan adalah tempat endemis penyakit DBD. Banyak bayi yang belum diberi vaksinasi dasar, masih ada kasus TB MDR, dan masih ada tingkat deteksi dini yang rendah terhadap faktor resiko penyakit tidak menular. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.  Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) masih rendah, kualitas kesehatan lingkungan di TTU masih rendah, dan TPM memerlukan kerja sama lintas sektor dan lintas program untuk mencegah dan mengendalikan penyakit menular dan penyakit tidak menular, imunisasi, dan pengawasan penyakit. diperlukan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk mendukung akreditasi dan re-akreditasi faskes tingkat dasar dan rujukan serta pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Tata ruang fasilitas kesehatan dasar harus sesuai dengan Permenkes no. 75 tahun 2014 Belum optimalnya pengaplikasian manajemen rumah sakit dan puskesmas hanya 2 (dua) puskesmas yang status akreditasinya purnama Puskesmas dan fasilitas kesehatan rujukan masih belum menggunakan sistem informasi kesehatan (SIKDA) dan SIM-RS secara efektif.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum diakses oleh semua masyarakat kota medan

belum optimalnya aplikasi satu data kesehatan karena data kesehatan belum terintegrasi Belum tersinkronisasinya data masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan, dan belum optimalnya sinergitas kemiskinan dan kesehatan lintas sektor

\*Sumber Data: Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026

Untuk mendukung data permasalahan yang diambil dari Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 ini, peneliti juga mewawancara seorang informan yang merupakan salah satu Perencana Ahli Madya di bidang PPEPD Bappelitbangda Provsu. Pertanyaan dalam wawancara tersebut merupakan bagaimana Bappelitbangda Provsu ikut berperan dalam penyusunan Dokumen Renstra.

*“Dalam Musrenbang yang dilaksanakan setelah fasilitasi evaluasi Renstra an dokumen-dokumen lain akan dilaksanakan tanda tangan nota kesepakatan sebelum dokumen tersebut naik ke Gubernur.”*

### **Bidang PPEPD dalam Pelaksanaan Evaluasi RPJPD Sebagai Dasar Pembuatan Kebijakan Kesehatan di Kota Medan**

Bappelitbang Provsu sangat penting dalam membantu seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dalam perencanaan kebijakan kesehatan. Di bawah struktur Bappelitbang, ada divisi yang disebut PPEPD (Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah). Divisi ini bertanggung jawab untuk menyusun dan mengesahkan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang, yang mencakup perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu dua puluh tahun ke depan. Dengan fokus pada perencanaan jangka panjang ini, divisi PPEPD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan daerah dilakukan dengan benar.

Seperi pernyataan dari narasumber kami yang memiliki jabatan sebagai Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (Bidang PPEPD) mengatakan bahwa segala dokumen tersebut adalah dasar dari pembuatan kebijakan yang mana salah satu diantara nya adalah kebijakan kesehatan.

“Bappelitbang itu semacam induk dari Bappeda yang ada di tiap daerah Kabupaten/Kota. Dokumen yang telah mereka susun harus dilaporkan ke kita dan di evaluasi oleh peserta rapat pada saat itu dan disetujui oleh Kabid PPEPD. Selain itu juga akan ada diadakan musrenbang di DPRD Provinsi jika dokumen sudah disetujui lalu dinaikkan ke Gubernur sebagai acuan dari pembuatan kebijakan”.

### **Peran Bappelitbang dalam Pelaksanaan Penelitian Kesehatan Sebagai dasar Rekomendasi Kebijakan**

Setelah menganalisis data dalam Renstra Pemetaan Masalah Kesehatan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Medan, salah satu masalah utama yang ditemukan adalah rendahnya tingkat deteksi dini penyakit tidak menular (PTM). Hipertensi, diabetes melitus, kanker, penyakit jantung, dan berbagai penyakit lainnya termasuk dalam kategori ini. Rendahnya deteksi dini ini menjadi perhatian serius karena penyakit-penyakit ini seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga seringkali baru didiagnosa pada stadium yang lebih lanjut. Hal ini menyebabkan lebih banyak kematian dan lebih banyak biaya perawatan kesehatan. Akibatnya, penting bagi lembaga terkait untuk meningkatkan upaya deteksi dini melalui penyuluhan, pemeriksaan rutin, dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengidentifikasi tanda-tanda penyakit sejak dini.

Hal ini semakin diperkuat dengan data target renstra tahun 2021-2026 tentang cakupan pelayanan penderita hipertensi pada tahun 2016-2020.

**Tabel 2. Cakupan Pelayanan Penderita Hipertensi di Kota Medan Pada Tahun 2016-2020  
Berdasarkan Data Renstra Dinas Kesehatan Kota Medan**

INDIKATOR	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-									
	KINERJA	SESUAI	TUGAS DAN	FUNGSI	SKPD	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pelayanan Penderita Hipertensi	100	100	100	100	100	15,63	15,63	9,43	8,97	31,55					

Bappelitbang Provsu sendiri memiliki rumah jurnal yang dapat memfasilitasi penelitian-penelitian kesehatan dalam scoup kebijakan. Permasalahan yang ditunjukkan oleh data di atas dapat menjadi dasar dilakukan penelitian terkait pelaksanaan program penurunan hipertensi di kota Medan dan apa yang menyebabkan perealisasian SKPD Dinas Kesehatan sangat jauh dari target yang diinginkan.

Untuk mendukung pernyataan ini, kami juga mewawancara salah satu narasumber mengenai penelitian yang bisa digunakan untuk melakukan pengajuan rekomendasi kebijakan.

*“Sebelum melakukan penelitian, pastinya kita membutuhkan data yang mengenai permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Permasalahan yang muncul dari data tersebut akan kita publikasikan ke dalam sebuah penelitian. Pada saat mengajukan rekomendasi kebijakan atau pun memberikan saran pada saat evaluasi, kita bisa menggunakan penelitian tersebut untuk memperkuat dasar dari saran atau rekomendasi yang kita ajukan”*

## PEMBAHASAN

### Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia dalam Evaluasi Pencapaian Target Dokumen Renstra

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program-program kesehatan di Kota Medan. Program-program tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan yang berada di bawah koordinasi Bappeda Kota Medan, seperti Dinas Kesehatan Kota Medan. Dokumen RPJPD ini merupakan rencana strategis yang menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan daerah pada tingkat yang lebih rendah, termasuk dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan mengacu pada hirarki dan skala prioritas yang ditetapkan.

Dokumen Renstra ini akan dilaporkan ke Bappeda Kota Medan sebagai salah satu dasar pembuatan RPJPD dalam bidang kesehatan yang kemudian akan dilaporkan kepada Bappelitbang Provsu untuk pembuatan RPJPD Sumatera Utara yang juga akan dilaporkan ke Bappenas yang menjadi Rancangan Utama dalam penetapan kebijakan nasional. Seluruh proses ini tidak lepas dari persetujuan DPRD yang akan menandatangani nota kesepakatan agar Rancangan tersebut bisa sampai ke tangan gubernur.

Karena itu, Bappelitbang Provsu memiliki peran untuk keberlanjutan program-program Kesehatan yang telah direncanakan Dinas Kesehatan Kota Medan yang berada dibawah naungan Pemerintah Kota Medan tersebut.

**Bidang PPEPD dalam Pelaksanaan Evaluasi RPJPD Sebagai Dasar Pembuatan Kebijakan Kesehatan di Kota Medan**

Pelaksanaan penyusunan dokumen RPJPD memiliki beberapa tahap. Dalam tahap tersebut, Bappelitbang Provsu memiliki peran sebagai fasilitator untuk mengevaluasi rancangan awal dan rancangan akhir RPJPD tiap Kabupaten/Kota. Pernyataan informan mengenai hal ini menyatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Medan sebenarnya berada di bawah naungan Bappeda Kota Medan, maka koordinasi antar instansi yang dilakukan Bappelitbang langsung kepada Bappeda dan juga Dinas Kesehatan Provinsi.

Koordinasi adalah komponen penting dalam perencanaan pembangunan dan sangat penting. Koordinasi ini harus dianggap sebagai kebutuhan penting bagi setiap organisasi atau instansi yang terlibat. Dengan koordinasi yang efektif, semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama dengan lebih baik untuk mencapai tujuan. Hal ini sangat penting ketika dokumen perencanaan pembangunan dibuat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen utama yang harus diperhatikan.

Tanpa kerja sama yang efektif, risiko tumpang tindih dalam pembagian tugas dan tanggung jawab dan kehilangan fokus pada tujuan bersama meningkat. Oleh karena itu, setiap organisasi atau instansi harus memastikan bahwa proses koordinasi dilakukan secara berkelanjutan dan terorganisir untuk memastikan kelancaran setiap tahap perencanaan dan menghasilkan dokumen yang lengkap dan berkualitas tinggi. Metode ini tidak hanya membantu mencapai tujuan pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa setiap aspek dan kepentingan yang relevan dipertimbangkan dengan baik.

**Peran Bappelitbang dalam Pelaksanaan Penelitian Kesehatan Sebagai dasar Rekomendasi Kebijakan**

Penelitian sebelumnya berjudul "Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis Data dan Jurnal untuk Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesehatan" menemukan bahwa hasil penelitian telah digunakan untuk membuat kebijakan kesehatan sejak lama. Dalam konteks ini, hasil penelitian telah lama digunakan oleh akademisi dan praktisi kebijakan untuk membuat kebijakan kesehatan. Metode ini disebut "Evidence Based Medicine" (EBM), yang menekankan pentingnya bukti ilmiah yang diperoleh dari penelitian untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengembangan kebijakan kesehatan. Pemanfaatan EBM memberikan dasar yang kuat dan terpercaya untuk perumusan kebijakan yang lebih efektif serta memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang diambil didasarkan pada data dan bukti yang relevan dan terkini.

Seiring dengan berkembangnya pemahaman akan pentingnya data dan bukti ilmiah, konsep EBM dan EBP semakin relevan. Ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam pembuatan kebijakan, dari pendekatan yang hanya mengandalkan pengalaman dan asumsi menuju pendekatan yang lebih rasional dan berbasis data. Dengan semakin banyaknya penelitian yang menghasilkan data relevan, diharapkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Ini juga mendorong kolaborasi antara peneliti, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan ekosistem kebijakan yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan yang terjadi. (Bambang Setiaji, 2022)

**KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan peran vital Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dalam perencanaan kebijakan kesehatan di Kota Medan. Bappelitbang berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator dalam proses evaluasi dan pengesahan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk RPJPD dan Renstra, yang menjadi dasar pembuatan kebijakan kesehatan. Peran ini

mencakup koordinasi antar instansi, evaluasi rancangan kebijakan, dan fasilitasi penelitian kesehatan sebagai dasar rekomendasi kebijakan. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan data yang akurat dan terkini, serta kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, pemanfaatan teknologi informasi dan big data dalam perencanaan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam perencanaan kebijakan kesehatan. Pemanfaatan hasil penelitian dan data yang relevan dapat meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran kebijakan kesehatan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Bappelitbang dalam melakukan dan memfasilitasi penelitian kesehatan menjadi krusial.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara atas izin yang diberikan untuk melaksanakan magang dan penelitian, serta atas akses data yang sangat membantu dalam proses penyusunan artikel jurnal ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para responden yang dengan rela hati meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan informasi yang sangat berharga. Selain itu, penulis juga ingin mengungkapkan penghargaan yang mendalam kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan, sehingga proses pembuatan artikel jurnal ini dapat berjalan dengan lancar. Kontribusi dan kerjasama dari berbagai pihak tersebut sangat berarti dan tak ternilai harganya dalam mewujudkan penyusunan artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2023). Kota Medan Dalam Angka 2023. Medan: BPS Kota Medan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2024). Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2024. BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Bambang Setiaji, Kodrat Pramudho. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis Data Dan Jurnal Untuk Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesehatan. *HEALTHY: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, Vol. 1 No. 3 Juli 2022
- Dinas Kesehatan Kota Medan. (2021). Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026. Medan: Dinkes Kota Medan.
- Dinas Kesehatan Kota Medan. (2023). Profil Kesehatan Kota Medan Tahun 2022. Medan: Dinkes Kota Medan.
- Hasibuan S, Marliyah. (2022). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BAPPEDA SU) dalam Perencanaan Pembangunan dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Cybernetics : Journal Educational Research and Social Studies*, Volume 3, Nomor 1.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Panduan Perencanaan Kesehatan Daerah Berbasis Data Terpadu. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lubis, A. M., Sari, K., & Putra, A. (2022). ‘Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kebijakan Kesehatan: Studi Kasus di Kota Medan’. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 10(2), 112-128.

- Margareta Harice Dua Lorang, dkk. (2024). 'Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitebang) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Sikka'. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. Volume 7 Nomor 2.
- Nasution, S. K., Tarigan, I. U., & Widyaningsih, V. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 5(2), 102-115.
- Pemerintah Kota Medan. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026. Medan: Pemerintah Kota Medan.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Purba, J. T., & Nasution, M. D. T. P. (2024). Data-Driven Health Policy Planning: Lessons from Indonesian Regions. *Journal of Health Policy and Planning in Developing Countries*, 15(2), 78-95.
- Purwanti W D, Hadiwijoyo S S, Purnomo D. (2023). Strukturasi Peran Bappeda Kota Salatiga dalam Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2021-2022. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7 Nomor 1, pp. 1836-1845.
- Rini Pratiwi, Jati Untari, Hotmaria Rohana Samosir. (2024) 'Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) KesMas Respati*, 9(3), pp. 196-209.
- Trisnantoro, L. (2018). Desentralisasi Kesehatan di Indonesia dan Perubahan Fungsi Pemerintah: 2001-2017, Apakah Merupakan Fungsi Regulator? Yogyakarta: PKMK FK UGM.